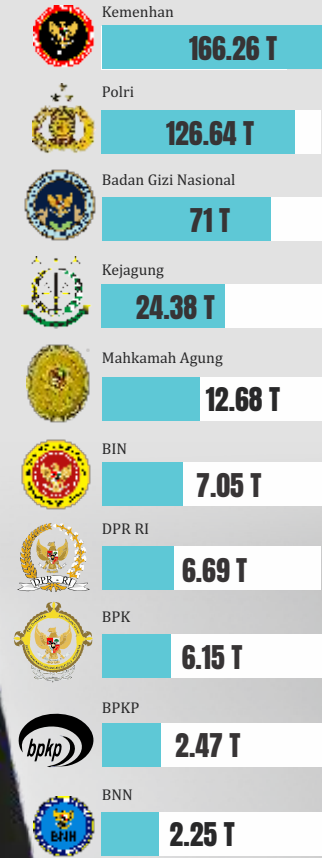


- 03** **POLITIC**
Coretax Sering Bermasalah, DPR-DJP Sepakat Urus Pajak Bisa Pakai Sistem Lama
- 05** **NUSANTARA**
Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog Dinilai Langgar UU TNI
- 08** **FAMILY**
Tips Konsisten Olahraga ala Melanie Putra

10 KEMENTERIAN/LEMBAGA TIDAK KENA PEMANGKASAN

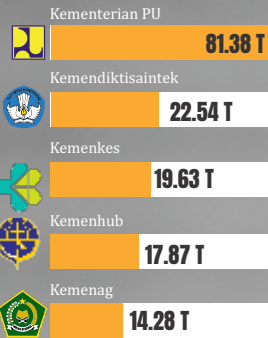


Efisiensi Anggaran Dilawan Prabowo Sentil 'Raja Kecil'

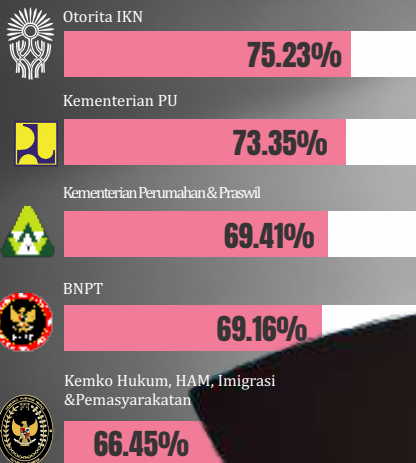
Keluhan mengenai kebijakan efisiensi anggaran kementerian secara besar-besaran menyeruak sejak diumumkan. Mulai dari rencana work from anywhere/home (WFA/WFH) sehingga ASN cukup ke kantor 3 hari dalam seminggu, hingga curhat air conditioner (ac) dimatikan. Bahkan beberapa kementerian/lembaga (K/L) mengatakan beberapa program kerja penting terancam tak dijalankan. Presiden Prabowo Subianto dengan lugas menyebut ada pihak yang mencoba melawan dirinya. Ia menyebut pihak tersebut sudah seperti 'raja kecil'. Namun siapa dia, Prabowo tidak membeberkannya. Presiden membeberkan alasan mengapa dirinya harus memangkas anggaran kementerian/lembaga. Ia menegaskan, langkah ini diambil demi rakyat Indonesia bukan kepentingan kelompok tertentu atau pribadi. Di sisi lain, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menunda seluruh rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Baca Hal 11....

5 KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN PEMANGKASAN TERBESAR (RUPIAH)



5 KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN PEMANGKASAN TERBESAR (PERSEN)



Ditjen Migas ESDM Digeledah Kejagung 70 Saksi Diperiksa, 15 HP-5 Dus Dokumen Disita

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah tiga ruangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pengegeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKStahun 2018-2023.

"Pengegeledahan mulai dari pagi menjelang siang hingga sore hari, dilakukan di tiga tempat atau di tiga ruangan. Yang pertama di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Kejagung, Senin (10/2/2025).

Harli mengatakan pengegeledahan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan selesai sekitar pukul 18.00 WIB. Menurutnya, penyidik membawa sejumlah barang bukti.

Harli mengatakan pengegeledahan



Penyidik Kejagung membawa sejumlah barang usai pengegeledahan di kantor Ditjen Migas ESDM, Senin (10/2/2025).ist

dilakukan sejak pagi tadi. Sebanyak 15 ponsel, lima dus dokumen hingga laptop disita penyidik Kejagung

"Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah menemukan barang-barang berupa lima dus dokumen, kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu unit laptop dan empat soft file," ujarnya.

"Nah sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka

membuat terang dari tindak pidananya," kata Harli menambahkan.

Harli menyatakan pihaknya lalu menyita barang-barang tersebut berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 23 dari Direktur Penyidikan.

"Tentu pada saatnya nanti penyidik akan memintakan persetujuan penyitaan terhadap barang-barang ini," ujarnya.

Sebanyak 70 saksi juga telah diperiksa oleh penyidik terkait kasus ini. "Oleh karenanya kami juga tambahkan bahwa penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan

setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan. Termasuk satu ahli terkait dengan keuangan negara," katanya.

Di sisi lain Kementerian ESDM menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung terkait pengegeledahan Ditjen Migas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menyatakan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

"Menyusul adanya kunjungan Kejagung ke kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan," tambahnya.

Chrisnawan menyebutkan pihaknya menghormati apa yang dilakukan oleh Kejagung. Kementerian ESDM, menurut dia, siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (din, rls, ist/dya)

Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK soal Gas Negara

JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019 Rini Soemarno tiba-tiba menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (10/2/2025). Nama Rini tidak ada di jadwal pemeriksaan yang dibagikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rini merampungkan pemeriksaan pada pukul 15.19 WIB. Ia mengatakan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT IAE.

"Pokoknya saya diminta saksi, saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemerintah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi," kata Rini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/2/2025) petang.

Ia mengaku tidak mengetahui mengenai kontrak kerja sama sama jual beli gas antara PGN dengan IAE. Penyidik, tutur dia, mendalami perihal transaksi yang dilakukan oleh Danny

Praditya sewaktu menjabat Direktur Komersial PT PGN.

"Oh enggak lah, itu kan transaksi yang saya rasa saya tadi juga tanya, loh ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa-biasanya enggak sampai dirut, biasanya enggak sampai dirut, tapi saya enggak tahu saya bilang gitu," ucap dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Rini Soemarno. Dia mengatakan keterangan bekas menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dibutuhkan untuk mengusut dugaan korupsi yang sedang ditangani.

"(Saksi, red) tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE tahun 2017-2021," ungkap Tessa dalam kesempatan terpisah.

Diberitakan sebelumnya, KPK pada tanggal 13 Mei 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT PGN Tbk. pada tahun anggaran 2018-2020. Penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dan perusahaan yang berinisial PT IG pada tahun 2018—2020, dan disebut telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi. Yakni Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; Rumah pribadi tersangka DP di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Rumah pribadi tersangka II di Kota Bekasi; dan Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

KPK juga telah mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Keduanya atas



Mantan Menteri BUMN periode 2014-2019, Rini Soemarno saat meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2/2025) usai diperiksa penyidik. (ist)

nama Danny Praditya (Direktur Komersial PT PGN) dan Iswan Ibrahim (Direktur Utama PT Isargas). Perkara yang sedang diusut ini menindaklanjuti hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wud, rls, ant/dya)

Coretax Sering Bermasalah, DPR-DJP Sepakat Urus Pajak Bisa Pakai Sistem Lama

JAKARTA-Sejak diluncurkan 1 Januari 2025 sistem baru perpajakan, Coretax, terus dikeluhkan. Bahkan masih sering bermasalah hingga saat ini, mulai dari sulitnya mengakses layanan, menghadapi respons sistem yang lambat, hingga error yang mengganggu aktivitas

Akhirnya, Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan menyepakati penggunaan sistem lama untuk urusan pajak. Sistem lama yang dimaksud adalah pembayaran dan lapor pajak lewat DPJ online atau situs pajak.go.id.

Hal ini disepakati dalam rapat soal sistem administrasi perpajakan inti Coretax di Kompleks Parlemen Senayan yang berlangsung kurang lebih lima jam pada Senin (10/2/2025). Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dimulai sekitar pukul 10.25 WIB dan selesai sekitar pukul 15.00 WIB.

"Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak," kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengatakan kedua sistem perpajakan ini akan berjalan secara beriringan.

"Jadi nanti yang dirasa perlu kita menggunakan sistem yang lama. Jadi rolling out-nya Coretax tetap jalan, keperluan jalannya dicoba sesuatu yang harus kembali ke sistem lama kami jalankan," jelas Suryo dalam kesempatan yang sama.

Dia mengemukakan penggunaan desktop faktur pajak untuk melakukan penerbitan faktur pajak saat penerbitan faktur pajak di Coretax belum berjalan optimal.

"Kemarin kan kita coba yang gede-gede dulu. Kalau sekarang sih secara prinsip Coretax sudah jalan sih. Cuma kami masih berikan keleluasaan lagi," jelasnya.

Suryo menjelaskan, untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2204 yang dilakukan di 2025 menggunakan sistem lama. Hal ini termasuk SPT yang akan



(Ilustrasi) Wajib pajak akhirnya diperbolehkan memakai sistem lama untuk urusan pajak yaitu DPJ online atau situs pajak.go.id. karena coretax masih bermasalah. (Dok)

disampaikan di bulan Maret dan April juga Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan PPh Badan.

Sementara, Coretax baru digunakan untuk laporan SPT 2025 yang disampaikan pada 2026.

"Nah, untuk SPT-SPT masa Januari, Februari, ini tergantung PPN, pemotongan-pemotongan PPh pasal 21 karyawan, kita menggunakan sistem yang sudah ada. Jadi kita menggunakan dua sistem yang jalan terus ya teman-teman ya," jelasnya.

Gangu Penerimaan Negara

Suryo Utomo, menilai implementasi sistem baru Coretax tidak boleh mengganggu penerimaan negara. Penggunaan dua sistem perpajakan Coretax dan sistem lama ini dianggap sebagai solusi demi menjaga penerimaan negara.

"Jadi sama-sama kita konsisten, implementasi Coretax jangan sampai mengganggu, upaya penerimaan negara. Jadi kita menggunakan dua sistem yang jalan terus ya," tutur Suryo.

Meski demikian, Suryo belum menjelaskan lebih rinci mengenai layanan sistem pajak mana saja yang masih akan menggunakan sistem pajak lama dan layanan sistem pajak apa yang menggunakan Coretax.

Suryo juga mengatakan, implementasi Coretax System mulai 1 Januari 2025 saat ini belum berdampak pada penerimaan negara. Sebab batas pembayaran dan penyetoran beberapa jenis pajak jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. "Nanti kita lihat ya, tanggal 15, tanggal akhir bulan Februari nanti kami coba lihat," jelasnya.

Diketahui, realisasi penerimaan

pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 tak capai target. Menkeu mengumumkan sepanjang tahun pajak yang terkumpul hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target Rp1.988,9 triliun.

Di tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp2.181 triliun. Terdiri dari penerimaan PPh sebesar Rp 1.209,27 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp 945,12 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 27,1 triliun.

Sebagaimana diketahui, Proyek Coretax yang digadang-gadang sebagai sistem perpajakan modern justru menuai banyak keluhan dari para wajib pajak. Sistem yang dikembangkan dengan dana besar ini dilaporkan memiliki banyak bug yang menghambat kelancaran administrasi perpajakan.

Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, wajib pajak mengalami kesulitan mengakses layanan, menghadapi respons sistem yang lambat, hingga error yang mengganggu aktivitas dunia usaha.

Keluhan ini semakin memperburuk citra proyek Coretax, yang diketahui pemenang tender pengadaan sistem Coretax adalah LG CNS, yang sebelumnya sempat bersengketa terkait paten.

Berdasarkan laporan dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), LG CNS pernah menghadapi kasus pelanggaran paten terhadap PT Prasimax Inovasi Teknologi terkait sistem perpajakan berbasis digital.

Diketahui, Prasimax mengembangkan sistem pajak online dan mendaftarkan patennya sejak tahun 2011. Namun, pada 2013, LG

Kesimpulan rapat Komisi XI dengan DJP tentang Coretax:

1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tentang implementasi sistem Coretax.
2. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menjamin bahwa sistem IT apa pun yang digunakan, tidak akan mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan pajak di APBN Tahun Anggaran 2025.
4. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis resiko yang paling rendah dan mempermudah Pelayanan terhadap Wajib Pajak.
5. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tidak mengenakan sanksi terhadap Wajib Pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada tahun 2025.
6. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dalam rangka penyempurnaan sistem Coretax wajib memperkuat Cyber Security.
7. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR RI secara berkala.
8. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.



CNS diduga menerapkan teknologi yang sama dalam proyek pajak online DKI Jakarta tanpa izin atau lisensi dari pemilik paten asli.

Prasimax sempat mengirimkan peringatan kepada LG CNS, namun perusahaan tersebut menolak mengakui pelanggaran dengan alasan paten Prasimax belum resmi disahkan saat itu. (din, wid, rls, ant/dya)

Setoran Awal Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 35 Juta



(Ilustrasi) Petugas menata dokumen paspor yang akan diberikan kepada jamaah calon haji saat tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. (Dok)

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan kenaikan setoran awal biaya haji. Kenaikan diusulkan menjadi Rp 35 juta dari yang sebelumnya Rp 25 juta.

"Kenaikan setoran menjadi Rp 35 juta seharusnya tidak menjadi masalah. Pilihan yang dihadapi jamaah haji adalah apakah mereka ingin membayar setoran lebih besar di awal, dengan biaya di belakang yang lebih kecil, atau sebaliknya, membayar setoran awal yang lebih kecil namun dengan biaya besar di akhir," kata Kepala Badan BPKH Fadlul Imansyah

sebelumnya.

Fadlul menguraikan, pada 2010 setoran awal haji adalah Rp 25 juta dengan total BPIH Rp 35 juta. Mengacu pada BPIH saat ini yang mencapai Rp 89 juta, setoran awal seharusnya berada di angka Rp 40 juta hingga Rp 45 juta, ini jika mengikuti proporsi 50 persen dari total biaya haji.

Namun, angka setoran awal haji tetap di angka Rp 25 juta dalam beberapa tahun belakangan. Padahal, biaya haji terus mengalami kenaikan.

Fadlul menjelaskan BPKH telah

dalam keterangannya saat dikutip Senin (10/2/2025).

Diketahui, usulan kenaikan setoran awal ibadah haji 2025 itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Kamis (6/10/2025) lalu.

Dia mengatakan kenaikan itu merupakan pertimbangan perbandingan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari tahun-tahun

melakukan survei untuk menentukan angka kenaikan setoran awal tersebut. Survei ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan bayar (Ability to Pay) jamaah haji di berbagai daerah, serta analisis terhadap pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah.

Berdasarkan survei tersebut, BPKH yakin angka Rp 35 juta merupakan nominal yang wajar dan dapat diterima oleh jemaah haji.

Selain itu, Fadlul menegaskan keputusan akhir mengenai kenaikan setoran awal haji adalah wewenang serta melibatkan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR. Dengan begitu, usulan kenaikan setoran awal haji masih perlu dibahas lebih lanjut dengan kedua pihak.

"Keputusan ini adalah keputusan dari Menteri Agama. Namun, kami juga paham betul bahwa Menteri Agama saat ini masih bergulat dengan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025, dengan fasilitas dan sebagainya sehingga kami melihat maupun sadari hal ini bukan menjadi prioritas. Tapi Insyaallah ke depannya setelah semua selesai mudah-mudahan kita sudah siap dengan setoran kenaikan menjadi Rp 35 juta," pungkasnya.

Di sisi lain, Kementerian Agama

(Kemenag) akan segera menerbitkan buku paket manasik haji tahun 2025. Buku ini memuat sejumlah poin penting, seperti istithaah kesehatan, fikih taysir, serta nilai-nilai filosofis dalam ibadah haji.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Hilman Latief, saat membuka Penyempurnaan Buku Paket Manasik Haji Tahun 1446 H/2025 M di Bekasi, Rabu (5/2/2025).

"Pada penyelenggaraan haji 2025, angka kematian jamaah kita upayakan dapat ditekan dengan adanya kebijakan ini (istithaah kesehatan), sehingga nanti perlu kita kuatkan kembali dalam bentuk edukasi di bimbingan manasik haji," ujar Hilman seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

Ia menyoroti tingginya kasus demensia di kalangan jamaah haji Indonesia pada tahun 2024, terutama pada lansia berusia 65 tahun ke atas. Menurutnya, hal ini perlu diantisipasi mengingat jumlah jamaah lansia yang berangkat haji tahun ini masih cukup tinggi.

"Buku paket manasik haji ini diharapkan bisa menggambarkan kondisi riil di Arab Saudi agar jamaah dapat melakukan persiapan lebih matang" tambahnya.(wid, din, ist/dya)

Cek Kesehatan Gratis Dibatasi, Puskesmas Layani 30-40 Orang/Hari

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) ternyata menetapkan kuota pendaftar 40 per hari untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Ulang Tahun. Dengan rincian 30 pendaftar secara daring dan 10 pendaftar offline atau datang ke puskesmas langsung.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan angka ini bisa saja bertambah. Hal ini tentunya disesuaikan dengan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas masing-masing puskesmas.

"Tadi kami melihat beberapa puskesmas sudah menambah sendiri. Jadi sebetulnya bisa bervariasi, ada yang bisa sampai 50. Tapi 30 (online) itu kami anggap manageable untuk semua puskesmas," kata Endang di puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

"Jadi kita saat ini kuotanya 30 dulu (online). Itu hitungan kami juga memang bisa nambah kuotanya, dengan SDM yang ada," lanjut dia.

Di hari pertama, Kemenkes menyebut bahwa SDM di 10.200

puskesmas Indonesia masih bisa menjalankan program cek kesehatan gratis ini, di samping pelayanan reguler.

"Nanti kita juga akan kerahkan Pustu (puskesmas pembantu). Jadi begitu caranya untuk mengatur load, tanpa untuk saat ini menambah SDM dulu," katanya.

Terkait evaluasi program, Endang mengatakan bahwa Kemenkes memiliki data real time cek kesehatan gratis, sehingga setiap bulan akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Untuk pemeriksaan sendiri, lanjut Endang, dewasa dan lansia (lanjut usia) rata-rata membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit, mengingat kondisi yang dicek cukup banyak. Sementara anak-anak membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

"Pemeriksaan awal yang sederhana (10.200 puskesmas) bisa. Pemeriksaan awal ini kayak gula darah, anemia. Untuk pemeriksaan lanjutan misalnya EKG

(elektrokardiografi) untuk yang hipertensi dan gula darahnya tinggi," kata Endang.

"Kalau EKG di puskesmas itu belum ada, nanti dirujuk ke puskesmas terdekat. Nanti akan diinformasikan ke pasien tersebut," tutupnya.

Sementara, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyatakan perkiraan nilai manfaat yang diterima setiap peserta program CKG bisa mencapai Rp 2 juta. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memeriksakan kesehatannya mengingat angka tersebut yang menurutnya tidak kecil.

"Memang cukup bervariasi antara



Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dimulai pada Senin (10/2/2025) menasar warga yang ulang tahun. Ist

satu orang dengan orang lain dan diperkirakan range-nya itu sekitar Rp 1,6 juta sampai Rp 2 juta. Jadi sayang sekali kalau "hadiah" ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga bangsa kita," ujarnya dalam kunjungan peninjauan pelaksanaan CKG di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Ciater, Tangerang Selatan, Senin (10/2/2025).(wid, ant, ist/dya)

Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog Dinilai Langgar UU TNI

JAKARTA - Penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dinilai melanggar aturan. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menegaskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dikatakan prajurit militer aktif dilarang menduduki jabatan sipil.

Dia berujar bahwa tugas utama seorang militer ialah sebagai alat pertahanan negara yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar. Fahmi mengatakan bahwa peran Bulog tidak berhubungan langsung dengan tugas pertahanan.

"Pemerintah tampaknya menilai bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan," katanya saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, penunjukan tentara aktif sebagai bos perusahaan yang berperan menjaga ketahanan pangan ini berkaitan dengan prioritas pemerintah. Adapun pemerintah Presiden Prabowo memprioritaskan sektor ketahanan pangan. Misalnya ketika tentara-tentara dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Penempatan tentara dalam beberapa program (prioritas) tampaknya memang diarahkan untuk mengintegrasikan antara kebutuhan aspek strategis dengan kebutuhan mendasar masyarakat," ucapnya.

Selain itu, dia menilai bahwa ada keinginan dari pemerintah untuk menciptakan sinergi antara tugas-tugas militer dan upaya memperkuat ketahanan nasional. Tak terkecuali urusan pangan dan kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa penunjukan tentara aktif sebagai pejabat sipil tidak bisa serta-merta diartikan sebagai kebangkitan militerisme. Menurut dia, militerisme mengacu pada dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan secara luas.

"Sedangkan dalam kasus ini, yang terjadi lebih merupakan keputusan spesifik pemerintah dalam menempatkan seorang perwira aktif di jabatan strategis," ucapnya.

Namun, dia menilai bahwa perlu adanya reformasi regulasi di instansi TNI itu sendiri. Misalnya, kata dia, dengan membuat aturan yang dapat mengakomodasi penugasan perwira aktif di sektor-sektor yang punya relevansi strategis.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan juga menyoroti sejumlah



Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri) di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2/2025) membahas percepatan serapan gabah. (ant)

kasus penempatan TNI di ranah sipil. Di antaranya pada penertiban kawasan hutan, program Makan Bergizi Gratis, hingga pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan.

Dia menilai bahwa kebijakan itu

bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat negara di bidang pertahanan. "Penguatan militerisme pada ruang-ruang sipil di awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan watak dan substansi

dwifungsi militer yang kental," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Pemerintah, kata Hasan, seolah menjadikan TNI sebagai solusi atas semua masalah pembangunan. Dia menilai bahwa pemerintah justru menganggap pelibatan militer di jabatan sipil untuk manifestasi akselerasi pembangunan.

"Paradigma ini memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu," ucapnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog tertanggal 7 Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025. (din, tmo, ist/dya)

Mayjen Novi Naik Pangkat, Jadi Danjen Akademi TNI

PANGLIMA TNI meneken Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025. Surat ini diteken pada 31 Januari 2025, dan baru diedarkan pada Senin (10/2/2025). Surat itu memuat mutasi Perwira Tinggi (Pati) TNI, yang terdiri dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU.

Salah satunya, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang mendapatkan kenaikan jabatan sebagai Danjen Akademi TNI setelah sebelumnya menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI. Dengan promosi tersebut, maka Novi otomatis naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga atau Letnan Jenderal (Letjen).

Juga terdapat pergantian pejabat strategis, yakni Mayjen TNI Helmy Prasetya yang menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI.

"Letjen TNI Rudianto, S.M., CSFA. Dari Danjen Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. dari Aster Panglima TNI menjadi Danjen Akademi TNI," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, lewat keterangannya, Senin (10/2/2025).

Novi melepas jabatan lamanya sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI, dan ia diganti oleh Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika.

Mayjen Nurdika, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam II Sriwijaya, akan digantikan posisinya oleh Mayjen TNI Ujang Darwis.

Soal penunjukan Mayjen Novi

sebagai Dirut Bulog, Kapuspen TNI, Maujen Hariyanto menyebut, penunjukan Novi berdasarkan kapasitasnya yang memiliki jaringan luas hingga level Babinsa.

"Penugasan ini dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN, yang melihat bahwa Mayjen TNI Novi Helmy memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa, yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional," kata Hariyanto.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebut telah menyetujui penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Adapun persetujuan itu diberikan karena TNI terikat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasarkan pada nota kesepahaman.

Hariyanto menjelaskan bahwa penunjukan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog merupakan bagian kerja sama strategis antara TNI dan BUMN.

Menurut dia, kerja sama itu juga sudah ditandatangani melalui nota kesepahaman antara kedua institusi, yakni TNI dan BUMN. "Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya," ujar Hariyanto.

Dia mengatakan, kerja sama ini dimulai dari permintaan Kementerian BUMN yang melihat bahwa Mayjen Novi Helmy memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga

ke tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Hariyanto menyebut, BUMN melihat pengalaman Novi Helmy tersebut dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional. "Selain itu, hari ini juga telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara TNI dan Bulog dalam rangka mendukung pengadaan beras dan gabah nasional tahun 2025. Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," kata mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih ini.

Terakhir, Hariyanto menyebut bahwa TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Selain Novi ada juga beberapa posisi strategis yang mendapat pejabat baru, seperti Pangkoarmada II yang kini dijabat oleh Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya, menggantikan Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, bahwa penunjukan Mayjen TNI, Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog merupakan pilihan, disaat bos perusahaan sebelumnya tidak maksimal menjalankan tugas pemerintah.

"Bagian dari, ya memang pilihan yang kita tadi, ekosistem," ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025). (dct, ist/dya)

Disperindag Kabupaten Malang Siapkan Rp 3 Miliar untuk Perbaiki 12 Pasar

MALANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk perbaikan 10 hingga 12 pasar pada tahun 2025 ini. Perbaikan difokuskan pada pembenahan infrastruktur yang mengalami kerusakan ringan, seperti atap bocor dan genangan air.

"Pembenahan pasar di 2025 ini kami hanya melakukan perbaikan kecil-kecil. Jadi masih sama seperti di tahun 2024 kemarin, tahun ini juga masih ada banyak keluhan terkait dengan pasar yang bocor, juga ada beberapa yang tergenang, dan segala macam," ujar Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Nor Fuad Fauzi, Senin (10/2/2024).

Fuad mengungkapkan, pihaknya belum dapat memastikan secara rinci pasar mana saja yang akan mendapatkan perbaikan. Saat ini, menurutnya tim dari Disperindag masih melakukan survei untuk menentukan skala prioritas. "Mana saja pasarnya kan masih disurvei sama teman-teman. Ya, kira-kira 10-12 dari total pasar di Kabupaten Malang," katanya.

Disebutkannya, besaran anggaran

perbaikan pasar juga bervariasi, tergantung pada kondisi pasar yang membutuhkan perbaikan. Namun ia menegaskan, secara keseluruhan Disperindag telah mengalokasikan dana sekitar Rp 3 miliar untuk pembenahan pasar tahun ini.

"Anggarannya tergantung, ada yang Rp 100 -150 juta, tergantung kondisi. Ini masih kami cek kondisinya," ungkap Fuad.

Lebih lanjut, Fuad menjelaskan di Kabupaten Malang terdapat 34 pasar rakyat dan 16 pasar hewan yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari 10-12 pasar yang akan diperbaiki tahun ini, dirinya memastikan beberapa pasar hewan juga masuk dalam daftar.

"Jadi nanti 10-12 pasar yang akan diperbaiki itu termasuk pasar hewan. Karena ada beberapa pasar hewan yang kondisinya itu kan becek. Dari 10 itu masih dicek, kemungkinan ada 2-3 pasar hewan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fuad juga mengungkapkan realisasi retribusi pasar pada tahun 2024 mencapai Rp 8,7 miliar. Jumlah ini dinilai cukup jauh dari target awal yang telah ditetapkan. Sementara itu,

target retribusi pada tahun 2025 mengalami penyesuaian.

Menurutnya, penurunan target retribusi ini disebabkan oleh adanya perubahan regulasi sehingga mempengaruhi besaran retribusi yang bisa dikumpulkan. Kalau tahun ini targetnya kalau gak salah Rp 17 miliar. Ada penurunan," katanya.

Di sisi lain, Fuad juga menanggapi terkait menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Fuad mengakui, pihaknya tengah mencari strategi agar pasar rakyat tetap dapat bersaing, terutama dengan menjamurnya toko online serta pusat perbelanjaan modern.

Saat disinggung apakah pihaknya akan meniru konsep pasar rakyat seperti yang diterapkan di Pasar Klojen Kota Malang, Fuad mengatakan hal tersebut masih



Pasar hewan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. (dok. ist)

dalam pertimbangan. "Ya kami melihat potensi. Tidak bisa serta merta diberlakukan. Tapi memang kalau sekarang ini yang banyak digemari ya makanan jadi, kebutuhan sehari-hari. Tapi kan kami juga bisa memaksakan itu harus dilakukan karena tergantung potensi yang ada," tuturnya. (Santi/Dya)

Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Wali Kota Malang Terpilih Pastikan Janji Politiknya Masuk APBD 2025



Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030, Wahyu Hidayat. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Wali Kota Malang terpilih, Wahyu Hidayat, memastikan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak akan menghambat realisasi program-program unggulannya. Dari 5 janji politik yang diusungnya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Ali Muthohirin, 4 program telah masuk

dalam APBD 2025.

Wahyu mengatakan, kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan maupun pelaksanaan program prioritas.

"Saya dengan Mas Ali juga masih mempelajari. Tetapi intinya kami tegak lurus dengan kepentingan nasional.

Saya kira tidak akan menjadi kendala juga. Kan sudah ada beberapa yang masuk dalam APBD 2025. Kemudian memang ada program yang harus kita evaluasi," ujar Wahyu, ditemui usai paripurna Penetapan Wali dan Wawalkot terpilih, Senin

(10/2/2025).

Wahyu menyatakan, satu program yang belum dapat terealisasi di 2025, yakni bantuan Rp 50 juta per tahun untuk RT. Menurutnya, program ini masih harus membutuhkan regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal) sebelum dapat direalisasikan.

"Ketua RT memang banyak yang menanyakan program ini. Tapi kita harus mengikuti mekanismenya. Harus ada tahapan sosialisasi dan penyusunan Perwal terlebih dahulu, baru bisa direalisasikan. Insyaallah bisa berjalan mulai 2026," jelasnya.

Untuk diketahui, empat program unggulan lainnya dari pasangan Wahyu-Ali, yakni seragam gratis, 1000 event per tahun, beasiswa pendidikan kepada 1000 penerima setiap tahun, serta menyelesaikan persoalan dasar di Kota Malang.

Namun, Wahyu optimistis efisiensi ini tidak akan menghambat program-program prioritasnya. Ia mencontohkan situasi ini mirip dengan efisiensi anggaran yang

dilakukan saat pandemi Covid-19, di mana pemerintah daerah harus menyesuaikan programnya dengan kondisi keuangan yang ada.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menilai pengalaman Wahyu selama 10 bulan menjabat sebagai Pj Wali Kota akan menjadi modal kuat dalam menyusun kebijakan yang lebih matang.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan program prioritas tetap berjalan.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan efisiensi anggaran akan menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini menegaskan, DPRD siap berkolaborasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk memastikan kebijakan tersebut tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. (Santi/Dya)

AS Bekukan Dana USAID, Apakah China Ambil Alih?

BEIJING - Keputusan Presiden Donald Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah memberhentikan proyek-proyek yang didanai AS di sekitar 130 negara. Hal ini berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, karena USAID merupakan salah satu sumber utama bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional.

Trump menuduh badan pembangunan USAID melakukan pemborosan. Pada 6 Februari lalu, ia menulis di platform "Truth Social", "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID." Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.

Para politisi oposisi di AS menuduh Trump membahayakan perjuangan global melawan kelaparan, penyakit, dan konflik.

"Ini bukan tentang amal," kata Andy Kim, Senator AS dari Partai Demokrat untuk New Jersey, dikutip pada Senin (10/2/2025).

"Ini adalah tentang peran kita dalam lingkungan global yang sangat kritis saat ini," tegasnya.

"USAID adalah salah satu alat terbaik kami untuk melawan pengaruh keuangan dan ekonomi dari China," lanjutnya.

Diketahui kedua negara adidaya ini juga menggunakan bantuan asing dalam persaingan mereka untuk mendapatkan supremasi global. Persaingan ini sangat jelas terlihat di Indo-Pasifik, misalnya di Bangladesh. Negara ini memiliki kepentingan strategis bagi China, dan dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa, negara ini merupakan pasar utama bagi barang-barang China.

China tidak mengungkapkan angka bantuan luar negerinya, tetapi para peneliti di College of William and Mary di negara bagian Virginia, AS, memperkirakan bahwa China telah membiayai 138 proyek pembangunan



di Bangladesh sejak tahun 2000, dengan nilai sebesar 21 miliar dolar AS (sekitar Rp343 triliun).

Sejauh ini, AS telah menentang hal ini, di mana pada tahun 2024 saja, AS telah memberikan bantuan senilai \$393 juta (sekitar Rp5,8 triliun) kepada negara tersebut.

"Bangladesh telah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan USAID dan pemerintah AS untuk waktu yang lama," kata Jashim Uddin, direktur Asosiasi Lembaga Pembangunan di Bangladesh (Association of Development Agencies in Bangladesh/ADAB), kepada DW dalam sebuah wawancara telepon. Ia menyatakan harapannya agar AS segera melanjutkan bantuannya.

Asosiasi yang dipimpinnya menyatukan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah. AS, sembari menambahkan, "AS telah mendanai kami sejak awal kemerdekaan kami pada tahun 1971."

Uddin mengatakan bahwa penghentian bantuan AS saat ini menyebabkan masalah yang signifikan bagi negaranya, di mana ribuan staf kini telah dirumahkan.

"Ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami sekarang. Ini akan melemahkan masyarakat sipil di Bangladesh. Ketidakstabilan sosial akan muncul dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan peningkatan kemiskinan. Semua ini akan diperparah," kata Uddin yang juga menyarankan agar pemerintahnya secara aktif mencari donor baru.

"Kita perlu melakukan diversifikasi pendanaan. China juga merupakan teman baik Bangladesh," katanya, seraya berharap bahwa China sekarang dapat memperluas dukungannya dengan memasukkan bantuan

kemanusiaan dan dukungan untuk proyek-proyek sosial.

Sementara USAID bekerja dengan organisasi lokal, China Aid, yang didirikan pada tahun 2018 yang berfokus pada pinjaman dan proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama: untuk mengamankan pengaruh pemerintah mereka di negara-negara mitra utama.

Dengan Belt and Road Initiative (BRI), China saat ini mencoba untuk mengikat lebih dari 145 negara melalui proyek-proyek besar bersama seperti jembatan, jalan, dan pelabuhan.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri China pada tahun 2024 menggambarkan bantuan pembangunan AS sebagai "egois, sombong, munafik, buruk, dan dengan ceroboh mencampuri urusan internal negara lain demi keuntungannya sendiri. Bantuan luar negeri AS membawa dampak negatif yang serius terhadap perdamaian dan pembangunan dunia."

Meski begitu, pertarungan pengaruh antara AS dan China bukanlah permainan zero-sum di mana salah satu pihak memenangkan apa yang dikalahkan oleh pihak lain, kata Evan Cooper, yang mengepalai proyek "Menata Ulang Diplomasi AS" di lembaga pemikir Stimson Center di Washington.

"Saya kira runtuhnya USAID, pembekuan dana dan pemecatan karyawannya tidak akan membuat para pesaing AS tiba-tiba mendapatkan pengaruh yang sangat besar di dunia," katanya kepada DW melalui telepon.

Pembekuan dana mungkin akan menyebabkan runtuhnya industri bantuan pembangunan.

"Namun hal ini tidak akan membuat China melangkah masuk untuk mengisi kekosongan," katanya.

Kemudian Juru Bicara

7 Negara yang Paling Banyak Terima Bantuan USAID

-  **Ukraina**
Pada 2023, USAID mencairkan US\$72 miliar tu sekitar Rp1.134 triliun. Dari jumlah ini, sekitar US\$16 miliar dikirim ke negara pimpinan Volodymyr Zelensky.
-  **Ethiopia**
Negara selanjutnya yang menerima bantuan dalam jumlah besar dari USAID adalah Ethiopia senilai US\$1,7 miliar atau sekitar Rp25 triliun.
-  **Afghanistan**
USAID juga menggelontorkan bantuan besar ke Afghanistan dengan nilai US\$1 miliar atau sekitar Rp15 triliun pada 2023.
-  **Somalia**
USAID juga mengucurkan dana dengan jumlah yang sama seperti Afghanistan.
-  **Yordania**
Yordania juga menerima bantuan sekitar US\$1 miliar atau sekitar Rp15 triliun pada 2023.
-  **Kongo**
USAID juga menggelontorkan bantuan ke Kongo hingga US\$740 juta atau sekitar Rp11 triliun pada 2023.
-  **Suriah**
USAID juga menggelontorkan bantuan ke Suriah sebesar US\$740 juta atau sekitar Rp11 triliun pada 2023.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah "Roy" Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan ini berdampak pada kerja sama bilateral dengan AS. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/2/2025), Roy menjelaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait program USAID yang akan terkena dampak langsung dari keputusan tersebut.

"Beberapa hibah yang diberikan USAID melalui mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 sudah berjalan selama beberapa tahun. Kami masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pihak AS mengenai kelanjutan hibah ini," ujar Roy.

Meski begitu, Roy menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan AS yang telah terjalin selama 75 tahun akan tetap kokoh. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara mitra, termasuk AS, selalu dipertimbangkan dengan matang dan didasarkan pada prinsip saling menghormati. (Deutsche Welle, ist/nei)



Pejabat USAID mendistribusikan bahan bantuan kepada masyarakat rentan FOTO: TWITTER

TIPS KONSISTEN OLAHRAGA ala Melanie Putraia

MENJADI istri, ibu, dan wanita karier tidaklah mudah. Multi peran ini dijalani Melanie Putraia dan banyak wanita lain.

Berbicara membagi waktu agar semua tanggung jawab bisa berjalan seimbang sambil menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan berolahraga tentu memerlukan trik tersendiri. Bagi Putri Indonesia 2002 itu, ia memulainya dengan sadar akan kebutuhan berolahraga.

Konsisten memang hal yang sulit dilakukan bagi sebagian orang, apalagi konsisten dalam berolahraga.

Untuk memperoleh tubuh yang sehat dan jauh dari penyakit pun prosesnya tidak bisa instan, harus dilakukan dengan niat dan tekad yang kuat.

Dalam artikel kali ini, bersama Agatha Suci dan Jeffry Thung, Melanie Putraia, serta Mikayla, kita akan membahas bersama-sama kunci mengatur pola hidup yang sehat dan bahagia dengan konsisten.

Pengalaman Melanie Putraia yang Membuatnya Rajin Berolahraga

Bagi orang-orang yang tidak terbiasa, mungkin olahraga adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan secara konsisten. Sama halnya dengan sang model dan presenter Melanie Putraia. Alasan yang membuat ia akhirnya memutuskan untuk rutin berolahraga pun cukup unik. Melanie Putraia yang dikenal pernah mengikuti

ajang kecantikan yaitu Puteri Indonesia, pernah mempunyai pengalaman yang agak pahit.

Pengalaman tersebut yang membuat Melanie akhirnya mendaftar ke pusat kebugaran pada tahun 2002. Mulai saat itu, ia mencoba pelan-pelan berolahraga. Melanie juga mengaku saat awal-awal nge gym, ia tidak tahu apa-apa mengenai gym dan alat-alatnya. Ade Rai juga salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup Melanie, karena berkat Ade Rai, Melanie jadi menyadari bahwa badan kita memang harus sehat. Sementara memiliki badan yang langsing dan bagus adalah bonus. Yang paling penting adalah sehat untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai.

Gula Ramah Ber-Indeks Glikemik Rendah

Selain berolahraga, pola makan, pola tidur, sampai stress juga sangat penting untuk dijaga. Apalagi kalau kita berbicara tentang makanan, bukan hanya kalori saja, tetapi kandungan gula dan zat gizi juga penting.

Dibandingkan dengan mengonsumsi gula reguler, lebih baik kita beralih mengonsumsi Gula Ramah yang memiliki Indeks Glikemik rendah. Jenis Gula Ramah yang ada di sekitar kita yaitu gula lontar, gula aren, gula kelapa, dan kurma.

Tips Sehat Sederhana ala Melanie Putraia

Menurut Melanie, lari tidak harus langsung jauh dengan target puluhan kilometer, kita bisa memulainya dengan berlari santai di sekitar lingkungan rumah.

Selain olahraga lari, Melanie juga menyarankan untuk mengonsumsi healthy breakfast seperti roti, sereal, atau granola. Salah satu granola yang bisa kamu konsumsi adalah snack dari Yava Bali. Snack dari Yava Bali ini mengandung Gula Ramah yang sangat bagus untuk dikonsumsi tubuh.

Untuk kamu yang super sibuk, back to back meeting, sampai mengurus anak di rumah, kamu bisa banget untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga sederhana seperti squat di sela-sela kesibukanmu. Gerakan-gerakan sederhana tersebut

sangat hemat waktu dan biaya karena dapat dilakukan di mana saja.

Pentingnya Menjaga Kualitas Tidur

Tidur juga memiliki peranan penting untuk menjaga kesehatan tubuh, loh, Happy Health! Berdasarkan rekomendasi dari WHO, durasi tidur yang cukup adalah 7 hingga 8 jam per hari.

Pengecualian untuk kamu yang terbiasa tidur di bawah 7 jam, kamu bisa meningkatkan kualitas tidurmu dengan mematikan lampu kamar, menerapkan deep sleep, dan tidur dalam keadaan tenang.

Yang perlu kamu ketahui, ketika kita tidur ada hormon melatonin yang diproduksi tubuh untuk membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Hormon ini hanya diproduksi di jam tertentu saja saat kita tidur. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga pola hidup terutama pola tidur yang teratur.

Berikut adalah beberapa tips nyata dari Melanie Putraia agar tetap konsisten berolahraga:

1. Mulai dengan langkah kecil

Melanie menekankan bahwa berlari tidak harus jauh. Cobalah melakukannya secara santai di lingkungan sekitar untuk membiasakan diri.

2. Sarapan sehat

Konsumsi sarapan yang sehat seperti roti, sereal, atau granola. Snack dari Yava Bali yang mengandung Gula Ramah bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk diintegrasikan ke dalam diet sehari-hari.

3. Aktivitas di sela-sela rutinitas

Bagi mereka yang memiliki waktu sangat terbatas, bisa mencoba melakukan gerakan sederhana seperti squat di sela-sela kesibukan rutin. Aktivitas ini tidak hanya hemat waktu tetapi juga mudah dilakukan di berbagai tempat.

4. Mindful eating

Fokus pada makanan yang dimakan dan perhatikan kandungannya, sehingga setiap gigitan dapat disyukuri dan dinikmati. Dengan langkah-langkah sederhana tetapi efektif, Melanie Putraia menegaskan bahwa menjaga kesehatan bukanlah hal yang instan. (nei,ist/dya)



Anjas Maradita Andalkan Galaxy S25 Series untuk Konten AI

ANJAS MARADITA, AI Expert sekaligus Content Creator dikenal aktif memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan kreativitasnya dalam membuat konten.

Ia baru-baru ini memilih Galaxy S25 Series sebagai andalannya dalam setiap proses kreasi kontennya.

"Saat mencoba Galaxy S25 Ultra, saya percaya untuk pilih smartphone ini sebagai mitra berkreasi saat membuat konten. Alasannya ada dua, yaitu teknologi AI yang terintegrasi antar aplikasi dan kualitas kamera yang sangat beragam dan nggak adaandingannya," kata Anjas dalam acara "Galaxy AI for Content Creation" yang digelar di Jakarta, dikutip pada Senin (10/2/2025).

Anjas mengatakan, teknologi AI sangat membantu mempercepat proses-proses yang sebelumnya menghabiskan waktu yang relatif lama.

Adapun penggunaan AI di Galaxy S25 Series untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pembuatan konten, di antaranya dengan memanfaatkan Gemini Live.

Dengan Gemini Live, Anjas bisa menonton video panjang di YouTube dan meminta AI untuk merangkum informasi penting dari video tersebut, bahkan menanyakan lebih banyak detail terkait topik yang dibahas.

Selanjutnya, fitur Audio Eraser yang bisa mendeteksi hingga enam tipe suara seperti ucapan, musik, angin, alam, keramaian, dan kebisingan.

Menurut dia, fitur ini bisa menyesuaikan volume suara di setiap

kategori untuk mendapatkan kualitas konten yang lebih bersih.

"Fungsi ini sudah built-in di Gallery tanpa aplikasi tambahan yang sering berbayar, jadi pengalamannya benar-benar seamless," ujarnya.

Anjas menambahkan, fitur Generative Edit semakin mempermudah dalam mengedit foto dengan lebih lancar.

Galaxy S25 Series memungkinkan AI mendeteksi objek dan mengisi latar belakang secara lebih alami, membuat hasil editing semakin sempurna.

Selain itu, ia juga menggunakan Generative Edit untuk membuat karakter AI sehingga menghasilkan visual yang berbeda dan kreatif, sesuai dengan tren animasi yang tengah berkembang.

Kemudian, Anjas memanfaatkan AI Select untuk membuat GIF dari berbagai gambar atau video dalam konten yang sudah dibuat.

Fitur ini memungkinkannya untuk dengan cepat memilih frame dari video atau gambar dan mengubahnya menjadi GIF yang siap diunggah ke media sosial.

"AI Select memudahkan saya membuat GIF dari konten yang sudah saya buat. Jadi, saya bisa langsung membuat cuplikan menarik untuk promosi di Instagram Story atau platform lain dalam hitungan detik," katanya.

Beberapa keunggulan yang disematkan Samsung pada ponsel terbaru mereka membantu para pengguna menghasilkan konten berkualitas tinggi. Salah satu fitur andalan seri Galaxy S25 adalah kamera yang dibantu teknologi AI.

Samsung terus melanjutkan inovasinya dalam menghadirkan kamera flagship dengan kemampuan ultrawide 50MP serta Next Generation Pro Visual Engine untuk hasil foto dan

video yang lebih estetik. Kemampuan untuk menangkap objek makro dibuat menjadi lebih baik dan setup kamera resolusi tinggi semakin memperkaya pengalaman pembuatan konten.

Samsung juga menghadirkan Virtual Aperture, fitur pada Expert Raw yang memberi keleluasaan dalam kustomisasi pembuatan konten dengan kontrol penuh atas aspek kamera.

Tak hanya itu, Galaxy S25 Series dilengkapi dengan Portrait Studio yang telah diperbaharui.

"Foto potret kini lebih detail dan natural berkat peningkatan teknologi pada Galaxy S25 Series, menghilangkan efek kartun yang masih ada pada model sebelumnya, sehingga menghasilkan gambar yang lebih halus dan realistis," ujar kata Senior Manager MX Product Marketing Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Prediksi Tren Kuliner 2025, Mana Favoritmu?

TAHUN 2025 membawa tren kuliner baru yang menarik, dengan berbagai inovasi unik yang akan memperkaya pengalaman makan dan membuatnya semakin menyenangkan.

Hal ini tak luput dari pengaruh media sosial, terutama TikTok yang menjadi katalisator utama dalam memviralkan berbagai kreasi dapur di penjuru dunia. Dari sandwich raksasa sampai perpusatakaan kafe, berikut ini prediksi tren makanan 2025 yang diperkirakan akan mendominasi!

1. Supercharged sandwich

Sandwich memang bukan hal baru dalam dunia kuliner. Namun, apa jadinya jika roti lapis disulap menjadi hidangan premium dengan isian melimpah dan cita rasa khas restoran bintang 5? Inilah salah satu gebrakan baru kedai Sandwich Sandwich di London. Sandwich yang semula hanya makanan biasa mendadak naik level dan berhasil mencuri perhatian.

Beberapa inovasi nyeleneh seperti "pickle sandwich" di New York juga tak kalah bikin penasaran. Kalau biasanya sandwich terbuat dari roti, pickle sandwich menggantinya dengan acar raksasa. Meski terlihat aneh, tapi banyak orang berbondong mencicipinya.

2. Clarified cocktail

Beberapa tahun terakhir, clarified cocktails alias koktail bening tengah naik daun, terutama di New York dan London. Bahkan, minuman ini mulai mendunia seperti "Ghosted Colada" di Singapura dan "Gamble" di Mumbai. Saking populernya, versi siap minum dari jenis koktail ini juga sudah tersedia, lho!

Sesuai namanya, clarified cocktail terlihat jernih karena melalui proses "clarification" yang menghilangkan partikel padatan di dalamnya. Gak

hanya estetik, cita rasanya juga lezat dan menyegarkan. Karena itu, tak heran jika minuman ini begitu trending dan digemari.

3. Aneka keripik menjadi menu restoran

Keripik yang biasanya dianggap sebagai camilan biasa kini berubah menjadi menu mewah di berbagai restoran. Di London, restoran Oma & Agora menyajikan keripik kentang pedas yang disajikan dengan berbagai saus khas Yunani. Restoran Toklas di seberang Sungai Thames juga menghadirkan keripik garam dan oregano homemade yang diberi topping kerang escabeche.

Restoran lain, seperti Leydi, bahkan menghadirkan keripik dengan campuran bumbu eksotis, seperti baharat, sumac, dan bawang putih. Tren ini membuktikan bahwa makanan sederhana seperti keripik bisa tampil lebih elegan dan dinikmati di restoran kelas atas.

4. Mi instan premium

Mi instan juga bisa disulap menjadi hidangan gourmet ala restoran michelin star yang memanjakan lidah, lho! Berkat TikTok, berbagai resep mi instan antimainstream bisa kamu coba di rumah. Misalnya, ramen carbonara yang dibuat dari ramen instan dan bumbu karbonara.

Dengan bahan-bahan yang tersedia di dapur, kamu bisa menyantap mi instan mewah dengan harga kaki lima. Tambahkan saja beberapa kondimen, seperti chili oil, sosis, udang, kerang, nori, atau bahkan truffle pada sajian mi instan dan siap ketagihan!

5. Library café

Bookshop bars atau library café yang menggabungkan perpustakaan

dengan kafe diprediksi akan semakin populer di 2025. Tempat-tempat seperti Liz's Book Bar di Brooklyn atau Gulp Fiction di Oxford menghadirkan konsep di mana pengunjung bisa menikmati buku sambil menyeruput minuman favorit.

Di Indonesia, tren ini juga mulai populer dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja Maison Wihelmina di Bandung, Makan di Tebet di Jakarta, dan Dongeng Kopi di Jogja. Bahkan, sejumlah tempat tak hanya menghadirkan koleksi buku yang lengkap dan seru, tetapi juga memiliki vibes menenangkan untuk membaca.

6. Korean sool

Demam Korea terus berlanjut. Bahkan, kali ini merambah ke kategori minuman beralkohol. Sool, atau minuman beralkohol yang hadir dalam berbagai jenis, seperti soju dan makgeolli, mulai menarik perhatian di segala penjuru dunia.

Penjualan soju pun meningkat drastis, dan banyak merek makgeolli bermunculan di luar Korea, termasuk Indonesia. Tren ini menawarkan pengalaman yang unik dan berbeda bagi pencinta minuman beralkohol, terutama mereka penyuka budaya Korea. Dengan cita rasa yang khas dan sejarah panjang di baliknya, sool pun semakin diminati.

7. Limoncello

Bicara soal minuman beralkohol, limoncello pun tak mau kalah. Minuman khas Italia ini kembali menjadi sorotan, tapi kali ini dengan versi lebih berkualitas. Limoncello kini gak hanya diminum langsung, tapi juga digunakan sebagai bahan dalam berbagai koktail dan dessert.

Beberapa restoran mewah, seperti The Dorchester di London, menawarkan koktail berbasis

limoncello, sementara supermarket seperti Waitrose memperkenalkannya dalam produk seperti panettone dan keju. Cita rasa lezat dan kesegarannya membuat limoncello jadi pilihan yang pas untuk segala suasana.

8. Hot dog gourmet

Saat ini, hot dog bukan lagi sekadar street food. Di 2025, hot dog versi gourmet mulai banyak bermunculan. Kehadiran topping mewah, seperti truffle atau keju fondue yang biasa ditemukan di restoran berbintang membuatnya makin premium.

Hot dog gourmet menawarkan kombinasi rasa yang menggugah selera tanpa menghilangkan esensi street food-nya. Tren ini membuktikan bahwa makanan sederhana bisa tetap menarik jika diberi sentuhan yang kreatif.

9. Hibachi

Hibachi adalah sebuah teknik masak asal Jepang. Hibachi berasal dari bahasa Jepang dimana "hi" berarti "api" dan "bachi" berarti "mangkuk". Ini merujuk pada cara masak di mangkuk panas atau nampan melingkar yang panjang, mirip teppanyaki.

Chef bisa menampilkan hibachi untuk memberikan kesan lebih dramatis pada pengunjung. Sebab kobaran api saat memanggang makanan pastinya bakal mencuri perhatian. Ditambah lagi dengan atraksi para chef dalam mengolah makanan.

Pada tahun 2025, Cozymeal, situs web pengalaman kuliner, memperkirakan popularitas hibachi akan terus meningkat. Bahkan hingga merambah ke catering dan truk makanan. Meski berasal dari Jepang, konsep hibachi dinilai s(nei,ist/dya)



Efisiensi Anggaran ... (dari Hal 1)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah, untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada 'raja kecil' yang melawan kebijakannya tersebut.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi 'raja kecil', ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang lebih 330.000. Namun, anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah.

"Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," ujar Prabowo.

"Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," sambungnya.

Ketum Gerindra itu kemudian menyinggung dirinya sendiri yang kerap ke luar negeri. Prabowo beralasan pergi ke luar negeri sebagai kepala negara atas undangan yang diterima.

"Loh Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting, oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," ucapnya.

Menurut Prabowo, seminar, kajian, hingga forum group discussion (FGD), sudah cukup dilakukan selama ini. **P r a b o w o m e n g u t a m a k a n** pengentasan kemiskinan, membantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah rusak diperbaiki, hingga jalan yang rusak diperbaiki.

"Diskusi, diskusi, studi banding studi banding mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia kok belajar ke Australia? Studi banding belajar Pramuka. Ada apa

belajar Pramuka? Grundel habis itu lobi-lobi wartawan, LSM, suruh nyerang, nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu," imbuhnya.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta memahaminya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam suratnya itu, Sri Mulyani pun telah menetapkan 16 kategori pengeluaran yang harus mengalami pemangkasan anggaran dengan persentase berbeda-beda, berkisar antara 10 persen hingga 90 persen. Surat tersebut juga menegaskan bahwa rencana efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial.

Meski begitu, tidak semua kementerian atau lembaga terkena pemotongan anggaran. Dalam laporan Tempo berjudul Pilih Kasih Pemangkasan Anggaran, tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tidak dipangkas Sri Mulyani.

Beberapa di antaranya adalah Polri, dengan anggaran sebesar Rp 126,6 triliun; Kementerian Pertahanan (Rp 166,2 triliun); dan Badan Intelijen Negara (Rp 7 triliun). Selain itu, lembaga tinggi negara, seperti DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, lolos dari rencana pemotongan anggaran. Begitu pula lembaga kepresidenan.

Sejumlah politikus Senayan menyebutkan anggaran Polri, BIN, dan Kementerian Pertahanan tak dipotong dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan. Jika anggaran lembaga-lembaga itu berkurang, pemerintahan bisa terganggu. Pekerjaan pengamanan oleh Polri dan pertahanan sulit berjalan maksimal.

DPR Tunda Rapat Penghematan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta semua komisi di parlemen menunda rapat bersama mitra kerja yang membahas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah. Instruksi ini tertuang dalam surat edaran Nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufridi Dasco Ahmad. Surat tersebut beredar pada Senin (10/2/2025).

Dalam edaran itu, pimpinan Komisi I hingga XIII DPR diminta untuk menunda sementara pembahasan mengenai pemangkasan anggaran dengan kementerian dan lembaga.

"Karena akan ada rekonstruksi

anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," demikian dikutip dari surat tersebut.

Lebih lanjut, Dasco meminta komisi yang telah membahasnya untuk menggelar kembali rapat setelah kementerian atau lembaga mendapatkan rekonstruksi anggaran terbaru.

"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, membenarkan adanya surat edaran tersebut dan mengaku sudah menerimanya. "Sudah," kata Dave saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

Senada dengan Dave, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, juga membenarkan bahwa pemberitahuan mengenai penundaan rapat telah disampaikan kepada jajarannya. "Iya (ditunda), ada pemberitahuan di grup komisi," ujar Andreas.

Namun, Andreas mengaku belum mengetahui sampai kapan penundaan ini akan berlangsung. "Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudina, meyakini bahwa semua komisi telah menerima surat edaran tersebut. "Semua komisi kayaknya sudah terima ya. Ini saya baru datang, saya cek dulu," kata Hetifah saat ditemui di Gedung DPR.

Ia menduga penundaan ini dilakukan karena kementerian dan lembaga masih membutuhkan waktu untuk menyusun ulang anggaran mereka sebelum dipaparkan ke DPR. "Beberapa kementerian memang memberi kesempatan untuk membahas internal sampai beres, baru dipaparkan ke DPR. Mungkin karena cukup serius ya, jadinya enggak bisa sembarangan," jelas Hetifah.

Sementara, Ketua Komisi XI DPR RI **M u k h a m a d M i s b a k h u n** memastikan kebijakan efisiensi anggaran tak akan mengubah ukuran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ukuran dan volume APBN tidak berubah sama sekali. (Belanja negara) Rp3.621,3 triliun itu tidak berubah," kata Misbakhun saat ditemui usai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menyatakan tujuan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemangkasan belanja pemerintah lewat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 memiliki tujuan yang jelas, yakni efisiensi dalam rangka meningkatkan

produktivitas.

Dalam konteks itu, pemanfaatan APBN didorong untuk lebih efisien, efektif, dan disalurkan kepada hal-hal produktif.

"Kebijakan efisiensi tetap berjalan. Efisiensi bentuknya seperti apa, silakan ditunggu," tambahnya.

Terpisah, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, berpotensi menimbulkan krisis fiskal baru. Hal ini terjadi jika pemangkasan anggaran hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

CELIOS menyatakan bahwa langkah efisiensi anggaran bisa berdampak positif, asalkan diarahkan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Askar, menegaskan bahwa realokasi dari efisiensi anggaran tidak bisa serta-merta digunakan untuk menutupi kekurangan dana MBG.

"Pendekatan universal coverage pada program MBG yang ada berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena memakan biaya besar," kata Media dalam keterangan resmi.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah melakukan pemotongan anggaran secara sporadis tanpa mempertimbangkan implikasinya. Menurutnya, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang.

Pemotongan anggaran BMKG, misalnya, justru bisa menghambat program swasembada pangan karena berpotensi mengganggu operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran," katanya.

Adapun CELIOS merekomendasikan agar skema MBG menggunakan pendekatan berbasis target (targeted approach), dengan menasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kelompok ini mencakup anak-anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, serta mereka yang tinggal di wilayah rentan malnutrisi.

Berdasarkan estimasi CELIOS, pendekatan berbasis target ini tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga membutuhkan anggaran lebih rendah, yakni sekitar Rp117,93 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih hemat dibandingkan skema pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun. (wid, rls, din, ant, ist/dya)



Bahas Raperda Panca Wira Usaha

DPRD Jawa Timur Soroti Permintaan Tambahan Modal

SURABAYA – Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar di Gedung DPRD Jatim menjadi ajang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha (PT PWU).

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, yang memimpin sidang paripurna tersebut menegaskan pentingnya mendengarkan pandangan umum fraksi sebagai bagian dari mekanisme legislatif dalam membahas setiap kebijakan daerah.

“Dalam rapat kita mendengarkan pandangan umum dari fraksi di DPRD Jawa Timur terkait dengan Rancangan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur,” ungkap Musyafak Rouf, dikonfirmasi Senin (10/2/2025).

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyampaikan keberatan fraksinya terhadap permintaan tambahan modal bagi PT PWU. Menurutnya, kinerja BUMD tersebut selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup mengkhawatirkan.

“Dari 2020 hingga 2023, kami mencermati bahwa PT PWU tidak mengalami progres yang berarti sebagai BUMD. Bahkan, dalam catatan kami, laba bersih perusahaan ini mengalami penurunan di kisaran 10 hingga 40 persen,” jelas Multazamudz.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kontribusi dividen PT PWU terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan signifikan, bahkan mencapai 47 persen pada tahun 2024. Sebagai salah satu BUMD terbesar di Jawa Timur, kondisi ini dinilai cukup mengecewakan.

“Penurunan laba bersih dan dividen ini menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola dan kinerja



Ketua DPRD Jatim Musyafak (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat (kiri) dan Blegur Prijanggono saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU Jatim), dilaksanakan pada Sabtu (8/2/2025)

PT PWU. Permintaan tambahan modal sebesar Rp500 miliar ini pun tidak disertai dengan analisis investasi yang jelas, serta tidak ditemukan rencana bisnis yang komprehensif dalam naskah akademik Raperda ini,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, melalui juru bicaranya Puguh Wiji Pamungkas, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD sebelum menyetujui Raperda ini. Menurutnya, momentum pembahasan perubahan status hukum PT PWU menjadi Perseroan harus digunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, bukan sekadar perubahan nomenklatur semata.

“Momentum pengajuan Raperda ini diharapkan tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi lebih dari itu, harus menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD Jawa Timur,” ujar Puguh.

Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah rencana kenaikan modal dasar PT PWU yang mencapai dua kali lipat, dari Rp250 miliar (berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2016) menjadi Rp500 miliar dalam Raperda yang diajukan saat ini.

“Bagaimana penjelasan dari kenaikan modal ini? Mengapa pemenuhan modal dasar perusahaan sejak 2016 hingga 2025 masih belum terealisasi sepenuhnya?” tanyanya.

Fraksi PKS berharap agar

pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan baik dan produktif, sehingga menghasilkan regulasi yang kredibel dan implementatif.

“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan Jawa Timur, terutama dalam peningkatan PAD,” paparnya.

Diketahui, rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU Jatim), dilaksanakan pada Sabtu (8/2/2025)

Kawal Perubahan Status Hukum

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, melalui juru bicaranya Ro'aitu Nafif Laha, memberikan sejumlah catatan kritis terkait dengan rencana perubahan status hukum PT PWU menjadi Perseroan. Menurutnya, rencana ini harus dikawal dengan ketat agar tidak hanya menjadi perubahan administratif semata.

“Kami melihat rencana peningkatan modal dasar PT PWU menjadi Rp500 miliar sebagai langkah strategis. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana modal tersebut dimanfaatkan secara optimal,” ujar Nafif.

Fraksi Gerindra meminta kejelasan mengenai

pemanfaatan modal yang diajukan, terutama dalam aspek ekspansi dan diversifikasi usaha yang lebih produktif. Nafif menyoroti pentingnya pengembangan sektor-sektor usaha baru yang berbasis teknologi dan industri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

“Sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur harus memiliki BUMD yang benar-benar produktif. Oleh karena itu,

modal yang besar ini harus diarahkan pada pengembangan properti berbasis teknologi, kawasan industri, serta sektor bisnis yang benar-benar memberikan keuntungan,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap unit-unit usaha yang saat ini dijalankan oleh PT PWU dan anak perusahaannya. Menurutnya, transformasi menjadi Perseroan harus didasarkan pada analisis bisnis yang matang agar perusahaan dapat menjadi entitas yang profitable dan sustainable.

“Kami ingin memastikan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan bentuk hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola perusahaan agar lebih profesional dan kompetitif,” pungkas Nafif. (Adv, Pra/Dya)



Penyerahan Pandangan Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri